

E-Planning Sebagai Kontribusi Sustainable Development Goals dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Tarempa

Yoga Saputra¹, Firman², Dina Fadiyah³

^{1,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email-yoga39299@gmail.com



INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article

Kata Kunci:
E-Planning;
E-Government;
Perencanaan Pembangunan;
Tarempa;

Article History
Dikirim : 19 Juni 2023
Diterima: 25 Juli 2023
Dipublikasi: 29 Juli 2023

ABSTRAK

Penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem E- planning telah digunakan dalam desain pembangunan kembali kota Kota Tarempa dan bagaimana hal ini membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030. menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif metodologi. Informasi yang diperoleh diperoleh dari interaksi dengan berbagai narasumber yang berkantor di Bappeda Kota Tarempa. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, implementasi E-Planning yang efektif di Bappeda Kota Tarempa dapat dikaitkan dengan transparansi peraturan perundang-undangan, ketersediaan infrastruktur teknis, aksesibilitas sumber daya keuangan, serta pengetahuan tentang tenaga kerja lokal. Pemanfaatan E-Planning menghasilkan beberapa keuntungan, yang paling menonjol adalah peningkatan akurasi, produktivitas, dan keterbukaan perencanaan pembangunan. Implementasi Sustainable Development Goals pada sektor e-government melalui e-planning yang komprehensif, akurat, dan efisien akan bermuara pada penurunan emisi, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai hasil perencanaan program pembangunan jangka panjang, dan maksimalisasi manajemen risiko selama proses pembangunan, yang semuanya akan menghasilkan populasi dan komunitas yang lebih produktif. Akibatnya, transisi ke digital dapat memainkan peran penting sebagai pendorong utama perubahan di dalam pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang luas dan inklusif, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.

ABSTRACT

This research provides an understanding of how the E-planning system has been used in the design of the urban redevelopment of Tarempa City and how this helps achieve the Sustainable Development Goals by 2030. using qualitative and quantitative research methodologies. The information obtained was obtained from interactions with various sources who had offices in the Bappeda of Tarempa City. According to the results of the research conducted, the effective implementation of E-Planning in the Bappeda of Tarempa City can be linked to transparency of laws and regulations, availability of technical infrastructure, accessibility of financial resources, and knowledge of the local workforce. The use of E-Planning generates several benefits, the most prominent of which is increased accuracy, productivity, and openness of development planning. Implementation of the Sustainable Development Goals in the e-government sector through comprehensive, accurate and efficient e-planning will lead to reduced emissions, increased regional economic growth as a result of planning long-term development programs, and maximization of risk management during the development process, all of which will result in more productive populations and communities. As a result, the transition to digital can play an important role as a key driver of change within government to promote broad and inclusive economic growth, social development, and environmental protection..

Pendahuluan

Pada tanggal 25-27 September 2015, para kepala negara dari seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan menggantikan Millennium Development Goals (MDGs). Tujuan-tujuan ini akan diakui sebagai upaya jangka panjang. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah seperangkat tujuan yang telah ditetapkan dengan maksud untuk memotivasi kekuatan global untuk mengatasi kesulitan global seperti mengurangi penggunaan bahan kimia, memberantas kemiskinan dan kelaparan, dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang masuk dalam agenda ini akan dikembangkan lebih lanjut menjadi 169 tujuan yang

membahas masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Majelis Umum PBB, 2015; Sudirman dkk., 2021).

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki pengaruh besar yang tidak proporsional terhadap pembangunan nasional dan masyarakat (Rizki, 2021). Hal ini terutama berlaku dalam hal kemampuannya untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan efektivitas di semua sektor ekonomi global saat ini. Dampak dari hal ini dapat dilihat dalam setiap aspek kehidupan sosial. Menurut Djohan dan Setyawan 2020, sebagian besar pemerintah di seluruh dunia sudah mulai menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan tidak hanya kualitas layanan publik dan tingkat kepuasan yang dirasakan warganya, tetapi juga komunikasi dan kerja sama antar publik, pemerintah, dan berbagai instansinya.

Menurut Dewi dan Mukhlis (2019), istilah “e-government” mengacu pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk tujuan peningkatan kualitas tata kelola. Meningkatkan operasi perusahaan dan memberikan layanan kepada sektor publik dan swasta merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Ini dianggap sebagai perubahan struktural yang menandakan pergeseran dalam administrasi publik, yang memungkinkan layanan publik yang lebih besar dan proses demokrasi yang lebih kuat. Pergerakan dalam administrasi publik ini ditandai dengan pergeseran dalam administrasi publik.

E-government, sering dikenal sebagai "pemerintahan online," adalah teknik penyediaan layanan pemerintah tradisional berbasis kertas melalui Internet. Sistem ini, dikenal sebagai "e-government," lebih hemat waktu dan biaya. Transisi layanan pemerintah ke platform digital dan perluasan akses publik terhadap informasi yang diperoleh melalui penggunaannya berkontribusi pada peningkatan efektivitas layanan tersebut. Tahap pertama e-government, yang dikenal sebagai tahap transaksional, telah berganti menjadi tahap transformatif. Menerbitkan, melibatkan, dan bertransaksi adalah tiga aspek berbeda yang membentuk platform e-government. Karena pengenalan e-government akan menghasilkan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik elektronik, struktur organisasi lembaga pemerintah perlu diubah secara fundamental.

Menurut Lutfi dkk (2019), dampak utama dari e-government meliputi administrasi dan transparansi yang lebih baik, serta peningkatan pemberian layanan kepada penduduk. Hal ini akan membuka jalan bagi peningkatan pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi untuk pembangunan.

Negara-negara yang mengakui nilai e-government telah secara aktif mendorong pengembangan inisiatif dan inovasi terkait, seringkali dengan bantuan organisasi donor. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan dan administrasi publik akan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Telah ditunjukkan bahwa ketika mempertimbangkan fakta bahwa banyak negara berkembang telah menderita selama beberapa dekade sebelumnya sebagai akibat dari institusi dan kepemimpinan yang lemah, kemungkinan membangun e-government dapat memberi jalan bagi negara-negara terpilih untuk mencari jalan keluar dari dilema ini. Hal ini ditunjukkan dengan mempertimbangkan fakta bahwa banyak negara berkembang telah menderita karena institusi dan kepemimpinan yang buruk. Ini menunjukkan bahwa banyak pemerintah di seluruh dunia mengabdikan diri untuk membangun e-government terlepas dari hambatan yang diberikan oleh masyarakat, ekonomi, dan politik (Syafitri, 2021).

E-government kini digunakan secara luas oleh beberapa lembaga pemerintahan besar di Indonesia, termasuk di Kota Tarempa. Salah satu contohnya adalah pengenalan sistem perencanaan elektronik pada tahun 2018 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas. Hal itu dilakukan untuk lebih merencanakan pertumbuhan kota Tarempa yang terletak di Siantan. Badan Anggaran dan Pembangunan Daerah (BPKP) bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem yang dikenal sebagai SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), yang digunakan pada peluncuran pertama. Baik Permendagri No. 86 Tahun 2017 maupun Permendagri No. 70 Tahun 2020 mensyaratkan penggunaan perencanaan elektronik yang sering disebut sebagai mekanisme penyampaian rencana pembangunan daerah. Penggunaan sistem perencanaan digital ini menghasilkan prosedur perencanaan yang lebih

sederhana, terintegrasi, dan terbuka untuk dicermati. Sejumlah besar penelitian telah dilakukan pada e-government dan cara-cara yang dapat berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Beberapa topik yang dibahas dalam studi tersebut antara lain bagaimana mengukur kontribusi pemerintahan digital terhadap SDGs, peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta keterkaitan antara pemerintahan digital dan tata kelola yang berkelanjutan (Simanjuntak & Purba, 2020). Meskipun demikian, ada kekurangan penelitian tentang e-government yang menargetkan implementasi e-planning dan kontribusi terhadap SDGs secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang berpotensi membantu peningkatan kajian tentang e-government dan SDGs. Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul “*Penerapan Perencanaan Elektronik Pada Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Tarempa Sebagai Kontribusi Sustainable Development Goals (SDGs)*”.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan teknik kualitatif fenomenologis, dan data diperoleh dari sampel sebanyak empat orang yang diambil dari arsip Bappeda Kota Tarempa dan masyarakat umum. Setelah itu, pengumpulan data kuantitatif menjadi jenis informasi yang paling populer, dan sumber primer dan sekunder menjadi sumber informasi utama dan sekunder yang dibutuhkan. Kumpulan data pertama diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan kumpulan data kedua diperoleh dari sumber tertulis. Pengamatan dan wawancara membentuk kelompok data pertama. Proses analisis data interaktif terdiri dari beberapa proses, antara lain pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. (Miles, Huberman, & Saldana, 2014; Sudirman & Phradiansah, 2019)

Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Tarempa: Kontribusi untuk SDGs

Pada tahun 2017, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang (Peraturan)No. 86 yang mengamanatkan evaluasi usulan perubahan peraturan daerah, penyusunan rencana jangka panjang pembangunan infrastruktur, dan penerapan e-planning. melalui aplikasi SIPD. Semua kegiatan ini diperlukan. Peraturan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Komprehensif Kabupaten Anambas Tahun 2016–2021 kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dikeluarkan pada tahun 2019. SK ini merupakan salah satu dari sekian SK yang dituangkan dalam SK tersebut. Hal ini seperti wawancara dengan AK selaku Kasubag program/perencanaan Bappeda Kota Tarempa

“karena kita menggunakan aplikasi SIPD dalam hal ini perencanaan, penerapan aplikasi inidi dasari oleh aturan Kemendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Nomor 86 tahun 2017 terkait pelaksanaan sistem informasi pemerintahan daerah, dan juga Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016- 2021”.

Implementasi sistem e-planning yang juga dikenal dengan aplikasi SIPD merupakan syarat wajib yang harus dicapai karena kebijakan-kebijakan yang menjadi pedomannya bersumber langsung dari pemerintah pusat. Konsekuensinya, pemerintah daerah juga diminta untuk menawarkan dukungan mereka kepada proyek tersebut agar dapat berhasil. Tujuan SIPD adalah mendistribusikan informasi yang terkini dan akurat untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Antarmuka dasar SIPD terdiri dari submenu yang diberi label "Sistem Informasi Pembangunan Daerah", "Sistem Informasi Keuangan Daerah", dan "Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya". Pengguna situs web SIPD diberi kesempatan untuk merencanakan tahun 2020, 2021, atau 2022 di halaman pertama situs web. Tahun-tahun sebelum dimulainya

proyek pembangunan regional dikhususkan untuk perencanaan proyek tersebut. Rencana Pembangunan Ekonomi Komprehensif Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Daerah (RESTRDA), dan Rencana Kerja Badan Pengatur Daerah (RKPD) adalah tiga tab yang dapat ditemukan di halaman utama situs SIPD kedua. Perluasan layanan e-government, dengan mempertimbangkan dua dimensi terpisah: adopsi dan implementasi. Fase adopsi mempertimbangkan desain dan distribusi layanan e-government untuk mempromosikan keterlibatan dan penerimaan yang lebih luas. Fase implementasi berfokus pada teknologi, pembiayaan, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk meluncurkan e-government. Hasil ini dari studi yang dilakukan oleh Joshi dan Islam (2018).

Dimensi implementasi sangat menekankan pada sumber daya manusia berupa pegawai yang bekerja di Bappeda Kota Tarempa; sumber daya keuangan, yang berupa alokasi anggaran yang berkontribusi pada efisiensi operasi prakarsa e-planning; dan teknologi informasi, yang berupa infrastruktur pendukung yang memungkinkan prakarsa semacam itu. Sesuai hasil rapat dengan Kasubag Program/Perencanaan AK, anggaran SIPD tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 732.963.994 juta. Jumlah ini sangat membantu penerapan sistem e-planning serta proses penganggaran yang terkait dengan SIPD. Namun, ketersediaan sumber daya seperti komputer bertenaga tinggi dan perangkat portabel merupakan faktor signifikan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap ketersediaan sumber daya infrastruktur. Lokasi ini menyediakan koneksi yang dapat diandalkan ke internet selain 15 komputer desktop dan laptop yang dapat diakses untuk digunakan. Konektivitas di dunia saat ini juga cukup cepat melalui Wi-Fi di home intranet, dan kualitas jaringannya luar biasa; gangguan apa pun terhadap konektivitas cenderung berakar pada masalah dengan server utama.

Di sisi lain, belakangan ini tidak ada gangguan teknologi yang berarti karena Kementerian Dalam Negeri berupaya menjamin sistemnya selalu hidup dan bekerja secara efisien. Sama seringnya, sumber daya manusia diikutsertakan dalam pelatihan teknis yang terkait dengan penerapan sistem e-planning, yang juga dikenal sebagai SIPD, dua atau tiga kali per tahun. Tentang pengenalan sistem perencanaan elektronik Dokumen ini memuat kebijakan penerimaan, belanja,

dan subsidi KUA untuk tahun pertama pelaksanaan SIPD, serta asumsi yang mendasari kebijakan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Negara Republik Indonesia (Peraturan) Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 7 Bunyi Kebijakan Umum APBD selanjutnya disingkat KUA. Selain itu, dokumen ini juga memuat asumsi yang mendasari kebijakan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari FA selaku sekretaris Bappeda Kota Tarempa dalam wawancara menyatakan bahwa:

“Jika infrastruktur penting dan sistem pendukung sudah dimasukkan ke dalam arsitektur sistem secara keseluruhan, jika sumber keuangan yang diperlukan cukup, dan jika kita tahu bagaimana melakukan penganggaran yang diperlukan, dan jika kita tahu bagaimana melakukan penganggaran yang diperlukan, maka semua itu adalah yang tersisa untuk dilakukan adalah mencari cara untuk mengintegrasikan semuanya ke dalam sistem perencanaan elektronik. Selain itu, kini ada lima orang yang bekerja di Bappeda yang berkontribusi signifikan dalam proses penyusunan laporan SIPD atau e-planning. Satu orang bertindak sebagai admin induk, empat lainnya bertindak sebagai admin bidang, dan yang kelima bertindak sebagai admin user untuk seluruh OPD”.

Gambaran mengenai latar belakang pendidikan pegawai di Kantor Bappeda Kota Tarempa seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	Uraian	S3	S2	S1	SLTA	Jumlah
1	Kepala Bappeda		1			1
2	Sekretariat		1	11	0	12
3	Bidang Pemerintahan & Litbang		4	6	0	10
4	Bidang Sosbud & Pembangunan Manusia	3	2	5		10
5	Bidang Ekonomi & SDA		4	6	0	10
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		4	6	0	10

7	Pejabat Fungsional		0	0	0	0
	JUMLAH	3	16	34	0	53
	%	6%	30%	64%	0%	100%

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Tarempa (2021)

Berdasarkan Tabel 1, 56,82 persen pekerja Bappeda Kota Tarempa berada pada golongan gaji terendah (S1), diikuti 22,7 persen pada golongan S2, dan terakhir 1,14 persen atau sebanyak 6 orang pegawai pada golongan gaji tertinggi (S3). Hal ini akhirnya terbukti penting dalam membangun sistem E-Planning. Ketersediaan sumber daya keuangan dan teknis mungkin menjadi penghalang untuk mengadopsi e-government, yang dieksplorasi panjang lebar pada pembicaraan meja bundar yang mengikuti penerbitan studi 2018 M. Choi et al. tentang masalah ini (M. Choi et al. , 2018). Namun, tidak ada masalah substansial dengan kapasitas SDM yang terdeteksi karena kemampuan TI back-end yang sangat baik. Mereka juga tidak mengidentifikasi kesalahan jumlah SDM yang berperan aktif dan bertanggung jawab atas kegiatan SIPD. Kurangnya informasi kemampuan TIK, tidak adanya keterampilan teknis.

Sementara penerapan sistem SIPD e-planning telah memberi Bappeda Kota Tarempa segalanya mulai dari perangkat keras hingga jaringan, ketersediaan dana pendidikan dan pelatihandari APBD merupakan perkembangan yang luar biasa. Pekerja di Bappeda Kota Tarempa yang berpartisipasi dalam proses perencanaan tentunya sudah diinstruksikan untuk menjadi lebih terinformasi dibandingkan dengan pekerja di OPD dan OPD lain, dan kini sudah cukup terampil untuk menerapkan sistem e-planning. Keadaan ini menunjukkan, sesuai dengan penelitian Gyamfiet al. (2019), bahwa infrastruktur TIK yang solid dan keuangan yang memadai penting untuk menjamin keberhasilan implementasi e-government, dengan sumber daya manusia yang sesuai dan waktu serta uang yang memadai. Namun, Diharapkan program SIPD ini dapat menggabungkan perencanaan dan penganggaran elektronik agar lebih berhasil dan efisien. Ini harus dilakukan dengan tujuan membatasi pengeluaran pemerintah dan mempertimbangkan bahaya duplikasi data. Hasil ini dari studi yang dilakukan oleh Joshi dan Islam (2018).

Mirip dengan bagaimana efektivitas e-planning dapat dievaluasi berdasarkan aplikasi SIPD yang bersangkutan, keberhasilan e-government dapat dievaluasi berdasarkan outputnya. AK dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Program/Perencanaan sampai pada kesimpulan bahwa penggunaan e-planning atau SIPD, dimana setiap komponen proses perencanaan ditempatkan dalam satu sistem elektronik dan dapat diakses kapan saja diperlukan untuk mengumpulkan data, dikaitkan dengan sejumlah keuntungan utama. karena itu, masyarakat tidak perlu memasukkan data karena masyarakat juga dapat mengaksesnya melalui aplikasi Musremba. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari FA selaku sekretaris BAPPEDA Kota Tarempa menyatakan bahwa:

“Manfaat yang kami peroleh dari sistem e-planning ini adalah kemudahan, kemudahan dalam perencanaan, dan transparansi yang lebih besar saat membuat rencana karena semua orang dapat melihatnya. Selain itu, tidak ada lagi hal-hal yang di luar konteks dalam rencana yang muncul sesekali, dan tentu saja kemajuan menuju tujuan. ”

Di sisi lain, menurut informasi yang diberikan oleh seorang warga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga yang bernama DJ, ternyata masyarakat belum merasakan manfaat yang diharapkan seperti yang saya rasakan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar penduduk tidak mengetahui keberadaan sistem tersebut, dan akibatnya, mereka tidak dapat memperoleh manfaat darinya. Menurut Djani dan Therikh (2017), kurangnya sosialisasi oleh penguasa kepada masyarakat umum menjadi akar penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi e- government, yang pada gilirannya membuat masyarakat resisten terhadap perubahan yang ditimbulkan. oleh kemajuan teknologi.

Di Bappeda Kota Tarempa, penerapan e-planning telah menghasilkan sejumlah manfaat, salah satunya adalah mempermudah kehidupan pegawai dengan memastikan bahwa rencana kerja disusun sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam dokumen Musrembang. Selain itu, penerapan e-planning telah mempersingkat proses pengembangan indikator kinerja yang terukur, sehingga proses menjadi lebih efisien secara keseluruhan. Selain itu, dapat digunakan dalam proses diseminasi materi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan kota dan wilayah. Proses perencanaan juga menjadi lebih produktif dan efisien sebagai hasil dari keuntungan. Dalam skenario

ini, penggunaan e-planning memudahkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan atau rencana tertentu, yang detailnya dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam sistem e-planning yang ada, dan dimana data yang dimasukkan kemudiandisortir sesuai dengan kriteria tertentu yang ditentukan. Sebagai akibatnya, sistem akan dapat mengurangi jumlah kesalahan yang dihasilkan selama proses memasukkan data.

Menurut temuan studi yang dilakukan oleh Hadi (2019), E-Government memungkinkan peningkatan penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat, lebih banyak komunikasi dengan perusahaan dan industri, peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, dan administrasi pemerintahan yang lebih efisien. Temuan ini sesuai dengan temuan tersebut. Lebih sedikit korupsi, lebih banyak keterbukaan, lebih nyaman, pertumbuhan pendapatan lebih besar. Masyarakat dapat mengakses sistem e-planning kapan pun dan di mana pun yang paling nyaman bagi mereka, semua rencana yang termasuk dalam anggaran tahunan dapat diakses dengan mudah, dan warga diberi kesempatan untuk mempertimbangkan proses perencanaan kapan pun dan di mana pun. mereka melihat cocok. Keunggulan dari sistem e-planning adalah sebagai berikut: dapat diakses oleh publik; semua rencana yang termasuk dalam anggaran tahunan dapat diakses dengan mudah. Menurut temuan studi yang dilakukan oleh Wibowo (2018), tujuan e-government adalah memberikan layanan yang transparan dan jelas, serta menghubungkan pemerintah dengan warganya. Konsekuensinya, diakui secara luas bahwa TIK berperan penting sebagai alat pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan.

Komisi *Broadband* untuk Tujuan Pembangunan Jangka Panjang 2025 bertanggung jawab atas pengembangan strategi ini, yang akan berfungsi sebagai landasan peluncuran untuk transformasi digital dan penerapan e-government. Rencana tersebut didirikan dalam kemitraan dengan mitra internasional. Merangkul transformasi digital diperlukan bagi pemerintah yang serius dalam memperluas transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam operasi mereka. Menurut Widaningsih (2019), e-government mempermudah integrasi kebijakan dan layanan pemerintah, yang pada gilirannya membantu memajukan pembangunan ekonomi secara luas, kemajuan sosial, dan

perlindungan lingkungan.

Menurut proyeksi Alassaf dan Szalay (2021), pada tahun 2025, setiap negara di Bumi akan berhasil mencapai tujuan pembangunannya yang tinggi. Biaya layanan internet broadband tidak boleh lebih dari dua persen dari pendapatan nasional bruto bulanan per kapita suatu negara, dan pada tahun 2025, tujuh puluh lima persen populasi dunia akan membutuhkan akses ke beberapa jenis layanan internet broadband. Layanan internet broadband harus dapat diakses secara luas dan terjangkau di negara-negara berkembang. Dengan bantuan TIK, bangsa ini mampu melaksanakan proyek e-government secara efektif, yang telah menyebabkan perubahan substansial dalam ekspektasi publik dan mengubah cara individu terlibat dengan pemerintah mereka (Dhaoui, 2013).

Tujuan Kemajuan Jangka Panjang adalah seruan untuk pertumbuhan e-government di semua sektor, dan dalam konteks kemajuan teknis saat ini dan berfungsi sebagai seruan. Oleh karenanya, penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di sektor perencanaan dan pembangunan kota melalui e-planning atau SIPD memungkinkan transformasi ide menjadi tindakan, pembentukan banyak koneksi antara berbagai pemangku kepentingan, dan penyediaan jaringan yang mudah diakses, pengembangan, penerapan, dan evaluasi aplikasi baru, serta pemantauan dan evaluasi rencana pembangunan kembali. Dengan kata lain, ini membuka jalan bagi pelaksanaan ide-ide yang telah disusun sebelumnya. Jika Strategi Pembangunan Jangka Panjang berhasil diterapkan di sektor perencanaan elektronik.

Kesimpulan

Pemanfaatan program SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) memungkinkan keberhasilan implementasi perencanaan elektronik di Bappeda Kota Tarempa. Keberhasilan implementasi E-Planning di Bappeda Kota Tarempa dapat dikaitkan dengan kerangka hukum kota yang jelas, yang telah ditetapkan baik di pusat maupun di daerah, serta ketersediaan komputer yang kuat dan sumber daya teknologi informasi lainnya seperti internet dalam infrastruktur TIK.

, serta pasokan dana yang konsisten dan pekerja terampil. E-designing bermanfaat dalam beberapa hal, termasuk meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat keterbukaan dalam proses perancangan bangunan. Sustainable Development Goals (SDGs) dapat diimplementasikan pada sektor e-government melalui E-planning yang komprehensif, akurat, dan efisien. Hal ini akan mengarah pada pengurangan emisi, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai hasil dari perencanaan jangka panjang untuk program pembangunan, dan maksimalisasi manajemen risiko selama proses pembangunan, yang pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat dan ekonomi yang lebih produktif. Oleh karena itu, transformasi ekonomi digital dapat berperan sebagai mesin utama perubahan dalam pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan luas, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alassaf, P., & Szalay, G. Z. (2021). *Engaging agriculture in e-government, E- agriculture potentials and its contribution in economy*. Journal of Agricultural Informatics, 11(2). <https://doi.org/10.17700/jai.2020.11.2.576>
- Dewi, S. A., & Mukhlis, A. (2019). *E-Planning Implementation for Sustainable Development: A Study on the Application of GIS in Spatial Planning in the City of Pekanbaru, Indonesia*. Journal of Spatial and Environmental Planning, 2(2), 111-120.
- Dhaoui, I. (2021). *E-Government for Sustainable Development: Evidence from MENA Countries*. Journal of the Knowledge Economy. <https://doi.org/10.1007/s13132-021-00791-0>
- Djani, W., & Therikh, P. (2017). *Study of electronic government in supporting public services in Kupang city*. International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017), 142–146. Atlantis Press.
- Djohan, E., & Setyawan, E. (2020). *E-Planning Implementation in Indonesia: Opportunities and Challenges*. Journal of Regional and City Planning, 31(1), 11-22. doi: 10.5614/jrcp.2020.31.1.2
- Firman, F. (2023). TATA KELOLA SMART CITY DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIF GOVERNANCE. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 9(1).



JOURNAL OF POLITICS AND
DEMOCRACY STUDIES

PARAPOLITIKA

Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)

Volume 4 Nomor 2, Maret-Agustus 2023

ISSN 2721-771X (Online)

- Firman, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem E-Kinerja terhadap Aparatur Sipil Negara pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 132-155.
- Hadi, S. (2019). *E-Planning dan Implementasinya dalam Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Joshi, P. R., & Islam, S. (2018). *E-government maturity model for sustainable E-government services from the perspective of developing countries*. *Sustainability (Switzerland)*, 10(6). <https://doi.org/10.3390/su10061882>
- Lutfi, M. A., Yetti, M., & Indriyani, I. (2019). *The Application of E-Planning in Indonesia: A Case Study in the City of Padang*. *Journal of Social Studies Education Research*, 10(1), 75-96.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Washington D.C: Sage Publications, Inc.